

## IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 62 TAHUN 2010 TENTANG PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR DI PULAU BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS

Dedi Suhendri<sup>1</sup>, Harapan Tua R.F.S<sup>2</sup>, Adiando<sup>3</sup>

Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

E-mail: dedisuhendri51081@gmail.com

### ABSTRAK

*Dalam implementasi kebijakan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Pulau Bengkalis Kabupaten Bengkalis belum sepenuhnya mampu terealisasi seperti dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Tingkat ekonomi dan fasilitas sarana prasarana di pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki perbedaan dibandingkan dengan pulau utama. Oleh karena itu, diperlukan strategi sumberdaya sosial dan ekonomi untuk meningkatkan partisipasi dan kapasitas masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Pulau Bengkalis Kabupaten Bengkalis dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Pulau Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini menggunakan teori Grindle terkait faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan.. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Pulau Bengkalis Kabupaten Bengkalis yang terjadi adalah lemahnya manajemen pemerintah dalam menggerakkan sumber-sumber organisasi yang terlibat dalam pemanfaatan karena banyaknya instansi dalam menyusun program dan kebijakan sehingga cenderung berjalan sendiri-sendiri. Belum ada lembaga yang menjadi pusat kendali atau rezim yang berkuasa atas kebijakan pengelolaan pulau kecil terluar secara fungsional dan struktural.*

**Kata Kunci:** *Implementasi, kebijakan, pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar*

### ABSTRACT

*In the implementation of the policy on Utilization of Outermost Small Islands on Bengkalis Island, Bengkalis Regency, it has not been fully realized as described in Government Regulation Number 62 of 2010 concerning Utilization of Outermost*

*Small Islands. The economic level and infrastructure facilities on the coast and small islands have differences compared to the main islands. Therefore, a social and economic resource strategy is needed to increase community participation and capacity. This study aims to describe the Implementation of Government Regulation Policy Number 62 of 2010 concerning the Utilization of the Outermost Small Islands on Bengkalis Island, Bengkalis Regency and identify the factors that hinder the Implementation of Government Regulation Policy Number 62 of 2010 concerning the Utilization of the Outermost Small Islands on Bengkalis Island, Bengkalis Regency. This study uses Grindle's theory regarding the factors that influence Policy Implementation. The type of research used is descriptive research with a qualitative approach. The data collection method was carried out by interview, observation and documentation. The results of this study indicate that in the implementation of the policy of Government Regulation No. 62 of 2010 concerning the Utilization of the Outermost Small Islands in Bengkalis Island, Bengkalis Regency, what happened was the weakness of government management in mobilizing organizational resources that involved in utilization because there are many agencies in formulating programs and policies so that they tend to run independently. There is no institution that becomes the center of control or regime in power over the policy of managing the outermost small islands functionally and structurally.*

**Keywords:** *Implementation, policy, utilization of the outermost small islands*

## **PENDAHULUAN**

Pulau Bengkalis merupakan pulau utama tempat pusat pemerintahan Kabupaten Bengkalis. Sementara pusat perekonomian penduduk sebagian besar berada di daratan bagian timur Pulau Sumatera dimana terdapat 7 dari 11 kecamatan yang berlokasi di daratan tersebut. Pulau lainnya adalah pulau Rupa yang menjadi destinasi wisata penting di Kabupaten Bengkalis. Berikut adalah peta administrasi Kabupaten Bengkalis. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Pulau-Pulau Kecil Terluar juga dikenal sebagai Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT), dan merupakan pulau-pulau kecil dengan

luas permukaan kurang dari 2000 km<sup>2</sup>. Pulau-pulau tersebut memiliki titik-titik pangkal koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum nasional dan internasional. Dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022-2042, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis mendukung upaya Pemerintah Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Sebagai bentuk usaha untuk terwujudnya kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 maka disusunlah perencanaan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten. Dalam

implementasi kebijakan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Pulau Bengkalis Pembangunan Sarana dan Prasarana Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dimaksudkan untuk memenuhi sekurang-kurangnya tiga (tiga) hal, yaitu terwujudnya kawasan perbatasan negara, khususnya aspek lintas batas yang tertib dan aman, terwujudnya kawasan perbatasan negara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan terwujudnya kawasan perbatasan negara sebagai halaman depan dan beranda negara atau sebagai jendela negara. Kabupaten Bengkalis belum sepenuhnya terealisasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah

Pentingnya kebijakan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagai bagian dari Pembangunan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Kabupaten Bengkalis diketahui dari uraian latar belakang di atas; Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul “Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar Di Pulau Bengkalis Kabupaten Bengkalis” untuk kajiannya. dengan maksud melakukan penelitian untuk menjelaskan bagaimana Pulau Bengkalis Kabupaten Bengkalis mengimplementasikan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010. Juga, tentukan kendala yang menghalangi Pulau Bengkalis Kabupaten Bengkalis untuk mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun

2010 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Berkaitan dengan manfaat kajian, temuan-temuan diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dan menambah wawasan terkait dengan implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Pulau Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

#### **KAJIAN PUSTAKA**

Penelitian terdahulu yang digunakan adalah penelitian yang memiliki kaitan langsung dengan penelitian saat ini. Tujuan dari penelitian sebelumnya adalah untuk lebih memahami masalah dari perspektif sejarah, bagaimana hubungannya dengan pengetahuan yang lebih umum, situasi saat ini, dan kemungkinan untuk masa depan. Neti Sunarti mempresentasikan hasil penelitian sebelumnya dengan judul Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pelaksanaan Program Pembangunan. Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan program yang telah menghasilkan tujuan dengan berbagai program pembangunan, terutama yang memanfaatkan potensi daerah.

Dengan temuan penelitian tersebut, Prof. Dr. Yulianto Kadji, M.Si. menulis “Pembentukan dan Implementasi Kepemimpinan Kebijakan Publik dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas.”

Setiap produk kebijakan yang ditujukan untuk kepentingan publik harus diciptakan untuk menyelesaikan masalah publik, bukan untuk melegitimasi penipuan. Oleh karena itu, berhasil atau tidaknya suatu produk kebijakan yang ditujukan untuk kepentingan publik sangat ditentukan oleh perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

### **Implementasi Kebijakan**

Sebagai kegiatan yang melibatkan penyelesaian pekerjaan melalui penggunaan sarana untuk mendapatkan hasil atau mencapai tujuan yang diinginkan. Menetapkan tujuan dan melakukan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut terjalin dalam proses implementasi. Menurut Nawi (2018), “membangun hubungan” dan “mata rantai” adalah komponen fundamental dari sebuah implementasi.

### **Pendekatan Implementasi Kebijakan**

#### *1. Pendekatan top-down*

Adalah satu sisi dan berjalan dari atas ke bawah. Pemerintah memainkan peran penting dalam proses implementasi. Metode ini mengasumsikan bahwa pengambil keputusan merupakan pemain kunci dalam keberhasilan implementasi, sedangkan pihak lain yang terlibat dalam proses dipandang sebagai penghambat. Akibatnya, pembuat keputusan meremehkan inisiatif

strategis yang muncul dari tingkat kesulitan dan subsistem keahlian lainnya.

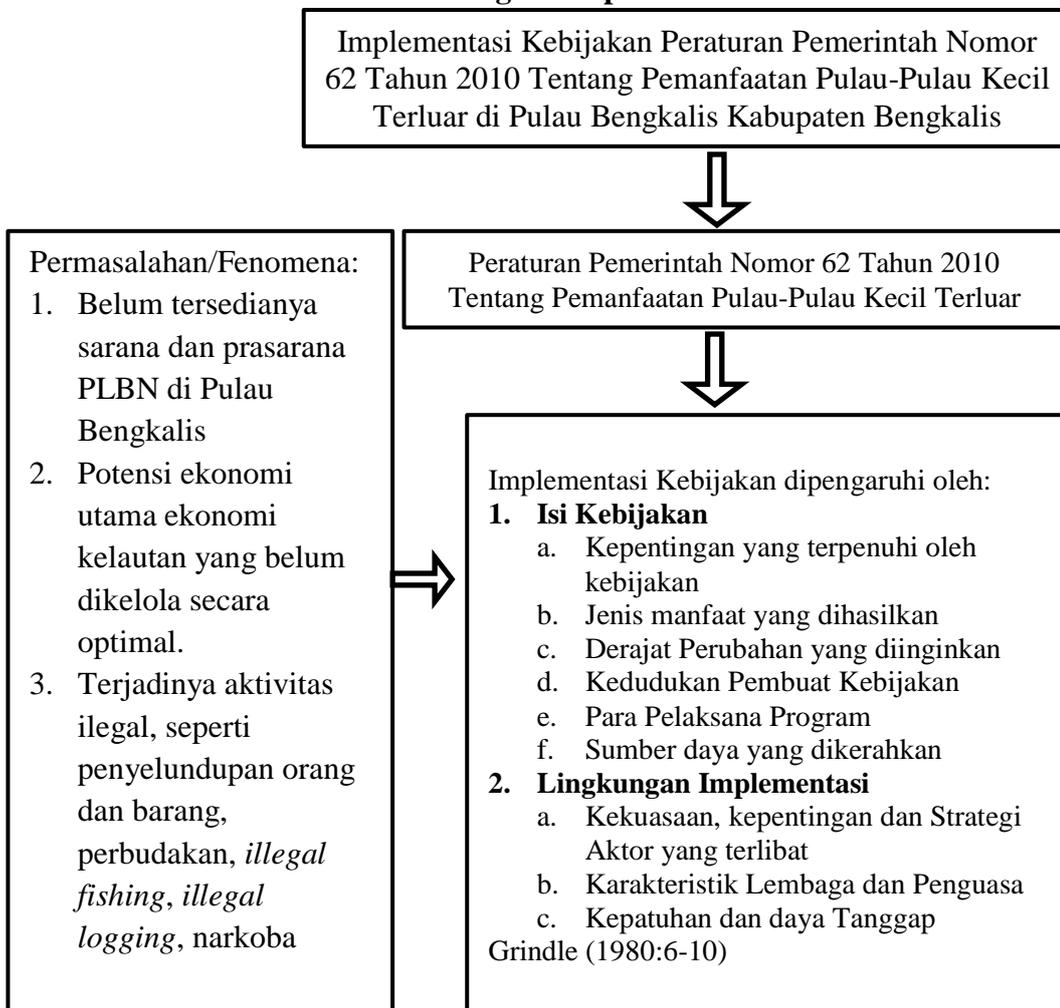
#### *2. Pendekatan bottom-up*

Suatu jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk melaksanakan implementasi kebijakannya sendiri atau tetap melibatkan pejabat pemerintah tetapi hanya pada tingkat rendah merupakan landasan dari pendekatan *bottom-up*.

### **Model Implementasi Kebijakan**

Menurut Grindle (1980) implementasi adalah menetapkan suatu mata rantai yang memungkinkan arah kebijakan umum direalisasikan sebagai suatu hasil dari aktifitas pemerintahan. Dalam hal ini, kebijakan pemerintahan diterjemahkan ke dalam program tindakan guna mencapai tujuan yang dinyatakan dalam kebijakan tersebut. Program tindakan itu sendiri dapat dijabarkan lagi ke dalam proyek-proyek spesifik yang mudah dilaksanakan. Kebijakan adalah pernyataan arah, tujuan, sarana yang bersifat luas dan umum. Proses implementasi hanya dapat dimulai apabila arah kebijakan umum dan tujuan sudah dinyatakan secara spesifik, program tindakan sudah didesain, dan dana telah dialokasikan untuk pelaksanaannya.

### Bagan. 1 Kerangka Berpikir



### METODE

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian fenomenologis. Moleong (2012) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai “penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami subjek penelitian secara holistik dan digambarkan dalam bentuk kata dan bahasa, dalam konteks alamiah yang khusus, dan dengan memanfaatkan

berbagai metode alamiah”. Penelitian ini menggunakan kajian pustaka, wawancara, observasi, dokumentasi, dan informan penelitian sebagai metode penelitian. Data sekunder dari buku dan jurnal yang berkaitan dengan topik yang dibahas digunakan dalam pendekatan ini. surat kabar dan sumber tambahan Dengan metode analisis kualitatif yang menggunakan empat tahap analisis-reduksi data, penyajian

data, kesimpulan, dan verifikasi-semuanya digunakan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penerapan Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Pulau Bengkalis Kabupaten Bengkalis merupakan bagian integral dari strategi pembangunan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang memberikan penekanan terhadap pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia, ekonomi kerakyatan, dan kegiatan pendukung lainnya. Khusus dalam Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Pulau Bengkalis, kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.

### **Perilaku organisasi dan antar organisasi dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pualu Kecil Terluar di Pulau Bengkalis Kabupaten Bengkalis**

Indikator ini berpendapat bahwa agar suatu kebijakan dapat dilaksanakan, banyak kepentingan yang berbeda harus dilibatkan, serta sejauh mana kepentingan tersebut mempengaruhi pelaksanaannya. Dalam Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Pulau Bengkalis Kabupaten Bengkalis melibatkan banyak kepentingan, tidak hanya kepentingan

Pemerintah Kabupaten bengkalis saja, melainkan kepentingan Pemerintah Provinsi Riau, bahkan Kepentingan Pemerintah Pusat terutama dalam hal mengamankan wialayah teritorial NKRI dari pengaruh asing. Untuk itu, pembangunan infrastruktur di Pulau Bengkalis menjadi sangat penting terutama dalam memberikan akses bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi.

Hasil wawancara Menurut Erdila Fitriyadi, SP, M.Si, yang merupakan Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis mengatakan bahwa:

“Pentingnya membangun Pulau Bengkalis di Kabupaten Bengkalis pada dasarnya telah diamanatkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Pulau Bengkalis Kabupaten Bengkalis, karena dengan Infrastruktur yang memadai akan berdampak bagi Kemajuan Pulau Bengkalis, segingga, untuk itu pihaknya berupaya membangun infrastruktur fisik berupa Pembukaan Jalan Baru, Pembangunan Jembatan, serta Pelayanan Kesehatan, dan juga sektor-sektor ekonomi lainnya, hal ini dilakukan guna menunjang Pulau Bengkalis untuk lebih maju, serta membuka akses bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas baik ekonomi, sosial dan Budaya di Kabupaten Bengkalis” (Wawancara dilakukan tanggal 03 Oktober 2022).

### **Jenis manfaat yang dihasilkan**

Untuk menjelaskan atau menunjukkan bahwa suatu kebijakan harus mencakup berbagai manfaat yang menunjukkan efek menguntungkan dari implementasi kebijakan yang akan dilakukan. Keterpencilan karena jauh dari pemerintah dan terbatasnya sarana transportasi dan komunikasi ke pulau-pulau tersebut, potensi utama ekonomi kemaritiman menimbulkan sejumlah tantangan, karena kurangnya pendidikan penduduk, tingkat kesejahteraan penduduk tetap rendah.

Hasil wawancara dengan bapak Rinto, SE, M.Siyang merupakan Kepala BAPPEDA Kabupaten Bengkalis mengatakan bahwa: “Pulau Bengkalis secara khusus diprioritaskan untuk kegiatan konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, budidaya laut, pariwisata, penangkapan ikan berkelanjutan, usaha perikanan dan kelautan, pertanian organik, peternakan, pertahanan dan keamanan negara, serta pemanfaatan lainnya.” (Wawancara dilakukan tanggal 03 Oktober 2022).

Menunjukkan bahwa pulau-pulau kecil terluar Kabupaten Bengkalis dapat dimanfaatkan dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan khusus untuk pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar Pulau Bengkalis melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian yang

berkesinambungan untuk menjamin keberlangsungan keberadaan pulau tersebut, serta dengan mengembangkan dan menata sarana dan prasarana transportasi yang memadai, meningkatkan kualitas, dan meningkatkan pemanfaatan jasa lingkungan dan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan.

### **Lingkungan Implementasi Kebijakan**

Upaya peningkatan kapasitas berbagai pihak yang terlibat dalam program pengelolaan pulau-pulau kecil, diharapkan bias dapat dihindari baik dalam pemahaman kebijakan dan strategi ataupun dalam menyusun program, yang mana didukung oleh penataan kelembagaan yang meliputi struktur organisasi pemerintah dan nonpemerintah yang menjembatani antara organisasi dan instansi yang bertanggung jawab; kumpulan standar kualitas, konvensi, hukum, dan aturan; dan sekumpulan norma dan tradisi sosial seperti hak dan hukum adat.

Menurut Ismail, S.Sos yang merupakan Tokoh Masyarakat di Pulau Bengkalis mengatakan: “Pulau kecil terjauh di kabupaten bengkalis ini masih memiliki persoalan di bidang pertahanan dan keamanan, terutama dengan keterbatasan infrastruktur dan sarana fisik serta tingkat kesejahteraan yang rendah”. (Wawancara dilakukan tanggal 03 Oktober 2022).

Sebagaimana dapat dilihat dari uraian sebelumnya, keadaan tersebut menimbulkan kekhawatiran akan

munculnya persoalan yang sangat kompleks, tidak hanya terkait dengan upaya pendistribusian hasil pembangunan tetapi juga dalam hal keamanan dan pertahanan ancaman. Kendala utama dalam mengelola potensi pulau-pulau kecil terluar adalah kurangnya kesadaran, komitmen, dan kemauan politik pemerintah untuk mengelolanya.

### **Faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Pulau Bengkalis Kabupaten Bengkalis**

#### **1. Belum tersedianya sarana dan prasarana PLBN di Pulau Bengkalis**

Di Pulau Bengkalis terdapat beberapa sarana dan prasarana yang masih terbatas, baik pemerintahan, transportasi, pendidikan, kesehatan, ekonomi, komunikasi, irigasi dan air bersih, listrik, serta pertahanan dan keamanan.

Menurut Ismail, S.Sos yang merupakan Tokoh Masyarakat di Pulau Bengkalis mengatakan: “Pelayanan kapal reguler yang dioperasikan oleh Pemerintah Daerah yang tidak memiliki waktu keberangkatan yang ditetapkan menunjukkan bahwa Pulau Bengkalis memiliki sarana transportasi laut yang minim. “Masalah aksesibilitas menghambat keterhubungan daerah perbatasan yang terbelakang dan terisolasi dengan pusat pemerintahan dan pelayanan atau

daerah lain yang relatif maju.” (Wawancara dilakukan tanggal 03 Oktober 2022).

Bahwa akses ke daerah perbatasan rata-rata masih kurang memadai. Padahal akan lebih banyak produksi (barang dan jasa) dan peluang pasar untuk meningkatkan pendapatan dari sektor industri jasa dan perdagangan jika daerah perbatasan memiliki akses fasilitas pendukung yang memadai.

#### **2. Potensi ekonomi utama ekonomi kelautan yang belum dikelola secara optimal**

Orang yang tinggal di wilayah ini biasanya memiliki kondisi sosial ekonomi yang jauh lebih buruk daripada orang yang tinggal di negara terdekat. Di Pulau Bengkalis, hal ini menimbulkan kerawanan sosial melalui kegiatan pemberontakan dan perdagangan ilegal.

“Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada PKT di Kabupaten Bengkalis ini bisa disimpulkan bahwa pemanfaatan PKT belum optimal sehingga belum dapat memberikan dampak positif secara optimal bagi negara Indonesia. Selain itu, apabila PKT tidak dimanfaatkan dengan baik dan terintegrasi akan menimbulkan masalah dan kerugian terhadap negara. Sehingga penting untuk dibuat suatu rencana strategis Pemanfaatan pulau kecil terluar di Kabupaten Bengkalis” (Wawancara dilakukan tanggal 03 Oktober 2022). Sudah diketahui

bersama bahwa pembangunan ekonomi wilayah pulau kecil terluar Pulau Bengkalis akan berhasil jika semua strategi pemanfaatan tersebut berjalan baik dan sesuai dengan rencana.

### **3. Terjadinya Permasalahan terkait Pertahanan dan Keamanan**

Pengelolaan pembangunan prioritas secara menyeluruh dan terpadu. meningkatnya aktivitas ilegal di wilayah perbatasan Pulau Bengkalis.

Menurut Muthu Saily, S.IP, MPA yang merupakan Camat Bantan mengatakan bahwa: “Penegakan hukum yang tidak efektif terhadap narkoba, perdagangan manusia, dan pencurian ikan” (Wawancara dilakukan tanggal 03 Oktober 2022).

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa Pulau-Pulau Kecil Terluar Pulau Bengkalis menghadapi sejumlah persoalan pertahanan dan keamanan. Isu-isu tersebut mungkin disebabkan oleh keberadaan pulau-pulau terluar yang rentan terhadap tindak kriminalitas, tidak adanya lembaga yang mengelola wilayah perbatasan secara holistik, dan masih adanya berbagai pelanggaran terhadap kedaulatan hukum NKRI.

### **KESIMPULAN**

Dalam proses penegakan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar Di Pulau Bengkalis Kabupaten Bengkalis, manajemen pemerintah gagal mengerahkan sumber daya organisasi

yang terlibat dalam pemanfaatan karena banyaknya instansi yang cenderung berjalan sendiri-sendiri. Secara fungsional dan struktural, tidak ada lembaga yang mengontrol kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar atau rezim yang berkuasa. Pembangunan tidak fokus karena keterbatasan sumber daya, terutama sumber pembiayaan karena anggaran masih terdistribusi di antara kementerian dan lembaga.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- AG. Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Guntur, 2004. Setiawan. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Islamy, M.Irfan. 2001. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lexi, J. Meleong. (1991 dan 2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Riant D. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Gramedia.
- Kristianti, K., Kusai, K., & Bathara, L. (2014). *Strategi Bertahan Hidup Nelayan Buruh di Desa Meskom Kecamatan Bengkalis Kabupaten*

- Bengkalis Provinsi Riau. Berkala Perikanan Terubuk, 42(1), 62-68.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. S. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik Transformasi Pikiran George Edwards III*. Jakarta: Lukman Offset.
- Wibawa, dkk. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 – 2042
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026
- Rosanti, Regina Vidia. Pembangunan Kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Melalui Border Tourism di Entikong, Kalimantan Barat. 2019. PhD Thesis. Universitas Gadjah Mada.
- Permatasari, Iman Amanda. "Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan)." *TheJournalish: Social and Government* 1.1 (2020): 33-37.
- Silitonga, Dikson. Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik. Vol. 1. Zahira Media Publisher, 2022.
- Tay, Dicky Siswanto Renggi, and Sugeng Rusmiwari. "Implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan." *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 8.4 (2019): 217-222.